

DAFTAR PUSTAKA

- Gerarldez G. Korobu1 dkk.(2016). Tirayoh, Analisis Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (Spm-Up) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung .Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi .Volume 16 No. 03 Tahun 2016
- Ar Razi, B. J. (2021). Sistem Informasi penolakan Surat Perintah Membayar (SPM)berbasis Web di Kantor KPPN Lhokseumawe. TTS4.0.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. (2021, September 20). From KPPN Surabaya Ii.
- KTI, T. P. (2020). Buku Pedoman Praktek Kerja Lapang Program Sarjana Terapan. Jember: Politeknik Negeri Jember.
- Perbendaharaan, D. J. (2017). Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2012 TentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/ PMK.01/2012 Tentangm Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262 / PMK.01 /2016 Menimbang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /Pmk. 05/2017 Tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah

Membayar Elektronik

1. Perbendaharaan. 2018. Treasury Indonesia. Jakarta